



**KEDUDUKAN DAN TUGAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN
MASYARAKAT JEPARA
(Studi Kasus Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Konsumsi Ikan Segar)**

Atika Fitriani*, Untung Dwi Hananto, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : atikafitriani63@gmail.com

Abstrak

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Penelitian ini terfokus kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Saat ini di Kabupaten Jepara sedang terjadi tingginya angka kematian ibu hamil akibat kurang gizi, dari sinilah pelaksanaan kedudukan dan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui penanganan masalah kesehatan yang terjadi di Kabupaten Jepara seharusnya bisa ditangani dengan memanfaatkan gizi dan kandungan ikan segar yang ada di Kabupaten Jepara, karena disana terdapat berbagai macam ikan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ikan mempunyai kandungan gizi yang tinggi, maka ikan perlu diperhitungkan sebagai sumber zat gizi yang penting. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam *PERDA Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara* pasal 12 bahwa Tugas dan Wewenangnya sangat berkaitan dengan urusan kesehatan termasuk masalah gizi di Jepara, yaitu "perumusan konsep dan pelaksanaan gizi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan.

Kata kunci : Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Peningkatan gizi, Konsumsi Ikan Segar

Abstract

As an executive element of regional autonomy in health area, Public Health Office is led by a head of office. This research focuses on Public Health Office, particularly on Public Health Office of Jepara. The researcher examines the development of society health quality in Jepara which at this time has high maternal mortality rate due to malnutrition which becomes the basis of duties and position of Public Health Office. According to the result, society can take benefits of fish to get nutrient to overcome the health problem in Jepara. Society needs to know that fish has a high nutrient content which has to be considered as a source of essential nutrients. To conclude this study in Regional Regulation of Jepara number 14 of 2016 about Positions, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of Public Health Office of Jepara article 12 shows Duties and Authority of Public Health Office associated with health matters including nutritional problems in Jepara, which is "concept formulation and implementation of nutrition, health promotion, community empowerment, and environmental health.

Keywords: District Health Office Jepara, Improved nutrition, Fresh Fish Consumption

I. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas. Dalam pembahasan ini tentunya yang dimaksud adalah permasalahan yang terjadi terkait

dengan kesehatan masyarakat desa Jepara. Penulis sempat memperhatikan perkembangan tentang Kesehatan masyarakat desa di Kabupaten Jepara, yang mana berdasarkan survei saat ini banyak masyarakat desa yang terkena penyakit bahkan meninggal akibat

kekurangan gizi, dari sinilah penulis akan membahas tentang bagaimana kedudukan dan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan gizi masyarakat desa melalui konsumsi ikan segar.

Kedudukan dan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan upaya meningkatkan gizi masyarakat desa merupakan bagian dari program pembangunan manusia Indonesia yang mana saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun pada saat ini Indonesia berada pada peringkat 108 dari 187 negara di dunia. Pembangunan manusia yang dimaksud disini adalah bagaimana pemerintah memanusiaikan kembali.

Banyaknya kasus kematian ibu hamil juga menjadikan konsentrasi khusus Dinas Kesehatan terutama pada daerah yang tertinggal. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan. Ada berbagai penyebab kematian ini baik kematian secara langsung maupun tidak langsung. Banyak faktor yang sebenarnya berada di luar bidang kesehatan itu sendiri, contohnya saja kurangnya asupan nutrisi, penggunaan air bersih, transportasi dan lainnya.

Guna mengurangi dampak kesehatan seperti contoh di atas, Kementerian Kesehatan mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan melalui program Indonesia Sehat sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjaga kesehatan dan meningkatkan mutu kesehatan

sampai derajat tertinggi. Program Indonesia Sehat terdiri dari :

- 1) Paradigma Sehat;
- 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer; dan
- 3) Jaminan Kesehatan Nasional

Ketiga program tersebut akan dilakukan dengan model penerapan pendekatan *continuum of care* (rangkaian kesatuan perawatan) dan intervensi berbasis resiko. Paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan.

Menyambung masalah kematian ibu hamil juga sudah menjadi bagian dari tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Tugas dan pokok dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tertera pula dalam peraturannya, yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.”¹

Dinas Kesehatan telah melakukan penelitian menunjukkan bahwa sumber perikanan yang besar di Indonesia, menjadikan ikan berpeluang tinggi dalam berkontribusi meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. Ikan sendiri mempunyai banyak keunggulan, salah satunya yaitu merupakan protein hewani, namun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan hal tersebut.

¹ Pasal 11 Ayat 1 Perda Jepara Nomer 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara

Ikan tidak hanya sebagai sumber protein, ikan dapat pula dikonsumsi sebagai bahan pangan, ikan juga merupakan sumber lemak, vitamin dan mineral. Hal ini seharusnya diketahui oleh masyarakat sejak dini, namun masih banyak dari masyarakat kita yang belum memahami akan hal tersebut, maka harus ada campur tangan dari pemerintah, sebagai mana yang tertera dalam Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengetahui hal tersebut, pemerintah sudah ikut berkontribusi dengan mengadakan lembaga khusus menangani masalah kesehatan di masyarakat yang tentunya juga berperan dalam upaya perbaikan gizi masyarakat.

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kabupaten dan Kota), daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan tetap berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. UU otonomi pemerintah daerah memberikan dampak yang luas di masyarakat, banyak pengamat mengatakan munculnya “raja-raja” kecil dan tambah menguatnya pengawasan tanpa kendali dari legislatif tanpa disertai dengan tumbuhnya kesadaran dan perubahan yang berarti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kesehatan masyarakat

Jepara, khususnya peningkatan gizi masyarakat desanya melalui konsumsi ikan segar?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan segar dan solusinya?

Perumusan tujuan penelitian bertujuan untuk menjaga agar penelitian tidak menyimpang dan tujuan semula dan sesuai dengan penggambaran arah penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

Tujuan Praktis :

1. Mengetahui tugas dan wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan upaya peningkatan gizi masyarakat.
2. Mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dalam melaksanakan upaya peningkatan gizi masyarakat dan solusinya.

Tujuan Teoritis :

Melengkapi study sarjana hukum untuk kemudian dijadikan referensi penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis dan bagi kepentingan praktis, manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah, serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

b. Penelitian ini merupakan latihan serta pembelajaran dalam mempraktekkan teori yang diperoleh, sehingga menambah wawasan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

c. Hasil pemnelitian ini dapat dijadikan referesnsi dalam pemecahan atas persoalan dari sudut pandang teori.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti yaitu, dengan melakukan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kepustakaan. Penulis dapat melihat dan membandingkan antara ilmuyang secara teoritis diterima dalam bangku kuliah, dengan realitas yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, apakah terjadi kesesuaian antara teori dan prakteknya dalam masyarakat.

b. Bagi para pihak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan masukan/saran dalam hal sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan kesehatan dalam hal ini upaya perbaikan gizi masyarakat melalui peran dinas kesehatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bila terdapat pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

c. Memberikan sumbangan kepada kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya mengenai perkembangan Hukum Tata Negara.

II. METODE

Suatu penulisan hukum dapat dibuat berdasarkan suatu penelitian yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan

memperoleh data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sitematika dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. Suatu penelitian pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode tepat dan benar.²

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada namun masih diragukan kebenarannya.³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 42

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm 15

bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dengan menguraikan data yuridis empiris dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan.

Deskriptif yaitu bahwa penelitian dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan yang terkait dengan pekerja waktu tertentu dengan beralasan pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan hukum ini.⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif

yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu gambaran.⁶ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, secara astronomis terletak antara 110° 9' 48,02" sampai 110° 58' 37,40" BT dan 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" LS.

Secara administratif Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi dalam 183 desa dan 11 Kelurahan. Dari 34 desa pantai. Panjang pantai Kabupaten Jepara adalah 82,73 km membentang dari kecamatan Kedung, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling sampai Donorojo. Ditambah Kecamatan Karimunjawa. Jarak kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Sedangkan jarak kota Jepara ke kota-kota terdekat lainnya yaitu dengan kota Kudus sejauh 35 km, Pati 59 km, Rembang 95 km, Blora 131 km dan Demak 45 km.

Kabupaten Jepara tidak termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal di Jawa Tengah. Namun,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004), halaman 13.

⁵ James A Black Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), hlm 3

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm 112

wilayah yang sangat luas sehingga ada kemungkinan beberapa bagian wilayah di Kabupaten Jepara mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.188.311 jiwa, sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.170.797 jiwa. Data yang didapat merupakan proyeksi dari jumlah penduduk pada tahun sebelumnya.

Dijelaskan dalam Perda Jepara Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara* bahwa tugas dan wewenangnya sangat berkaitan dengan urusan kesehatan termasuk masalah peningkatan gizi di Kabupaten Jepara, hal tersebut sudah dijelaskan dalam peraturannya karena menurut Perda Jepara Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara* terdapat tugas pokok Dinas Kesehatan Jepara, yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan”⁷

Berdasarkan penjelasan dari Perda tersebut, sudah jelas bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sudah diarahkan untuk menangani masalah gizi buruk yang ada demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa Kabupaten Jepara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai visi dan misi yang secara singkat ingin mewujudkan kesejahteraan terutama dalam bidang gizi. Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta misi Dinas

Kesehatan Kabupaten Jepara adalah menggerakkan dan menjadi fasilitator terhadap pembangunan kesehatan bersama-sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik dari sisi fisik, sosial dan mental.

Dinas Kesehatan Jepara juga mempunyai Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Tujuan Umumnya, yaitu :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan Khususnya, yaitu :

- 1) Meningkatkan umur harapan hidup.
- 2) Menurunkan angka kematian bayi (AKB).
- 3) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI).
- 4) Menurunkan prevalensi gizi kurang pada anak balita.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki visinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya, yakni: “Menjadi Institusi penggerak dalam mewujudkan masyarakat Jepara sehat yang mandiri dan berkeadilan.”

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdapat dalam Peraturan Daerah Jepara Nomor 17 Tahun 2010, yaitu : “Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.”

⁷ Pasal 11 Perda Jepara Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara*

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuannya harus memperhatikan hasil analisis lingkungan strategis maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki strategi – strategi sebagai berikut :

Strategi 1 :

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas. Kebijakan – kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara :

1. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dengan memberi perlindungan kepada penduduk miskin dari dampak kesehatan akibat ketidakmampuan.
2. Meningkatkan keberdayaan Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayahnya.
3. Mendirikan PKD di tiap-tiap desa.

Strategi 2 :

Meningkatkan kapasitas institusi dengan selalu memperhatikan akan kecukupan pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Kebijakan – kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara :

1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan data informasi bidang kesehatan guna mesukan program pengembangan kesehatan serta pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan akuntabilitas institusi melalui pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan yang transparan dan kecukupan regulasi sebagai dasar pelayanan bidang kesehatan.
3. Memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada unit pelayanan.

Strategi 3 :

Menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat. Kebijakan – kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam berperilaku sehat dan mampu menangani masalah kesehatan secara lebih mandiri.
2. Melindungi masyarakat dari dampak kondisi lingkungan yang buruk, serta mencegah dan menanggulangi berkembangnya penyakit.

Penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, memberikan hasil yang luar biasa. Peneliti dapat langsung mewawancarai kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yaitu dr. Dwi Susilowati, M.Kes. menurut beliau, masalah kesehatan di Kabupaten Jepara relatif stabil. Berbagai penyakit yang sering dikeluhkan masyarakat yaitu penyakit diare dan tingginya angka kematian ibu hamil akibat kurang gizi, kemudian kematian pada ibu hamil inilah yang sekarang menjadi focus utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Kepala Dinas Kesehatan Jepara, Ibu dr.Dwi Susilowati, M.Kes menentukan kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Jepara berdasarkan perpektif sosial, ekonomi dan sarana prasarana. Perspektif sosial dapat dilihat berdasarkan kondisi kesehatan (AKI, AKB, Balita kurang gizi dan pendidikan). Perspektif ekonomi dapat dilihat berdasarkan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan masyarakat, sedangkan perspektif pembangunan fisik terwakili oleh

dimensi aksesibilitas, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

A. Program Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

Berbagai program kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan gizi masyarakat Jepara, antara lain :

1. Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Kabupaten Jepara

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) & Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). GEMARIKAN diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 April 2014 oleh Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Peluncuran GEMARIKAN dilakukan bersamaan dengan peresmian Pasar Ikan Higienis (PIH) Pejompongan Jakarta Pusat. Pencanangan GEMARIKAN merupakan momentum yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang kuat, sehat, cerdas dan berpenampilan prima sekaligus membangun karakter bangsa, yakni mencerdaskan masyarakat secara fisik dan mental dengan mengkonsumsi ikan.

Adanya program GEMARIKAN diharapkan masyarakat Kabupaten Jepara akan memperoleh asupan nutrisi dari sumber pangan ikan yang kaya gizi, menguatkan, menyehatkan dan mencerdaskan. Disamping itu, diharapkan pula dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah dan

pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan.

2. Pelaksanaan Lomba Cipta Masakan Ikan Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2016

Jepara sangat kaya dengan potensi perikanan, baik itu perikanan darat maupun ikan laut. Namun hingga kini kekayaan tersebut belum banyak dimanfaatkan, utamanya untuk memenuhi konsumsi kebutuhan gizi masyarakat sehari-hari. Terkait hal ini Tim Penggerak PKK Jepara bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menggerakkan kampanye makan ikan.

3. Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Warung Sekolah

Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan pelatihan dan sosialisasi ke kantin-kantin sekolah di Kabupaten Jepara untuk menjual makanan yang berbahan dasar ikan. Hal ini dilakukan agar siswa-siswi terbiasa mengkonsumsi makanan berbahan dasar ikan segar. Kegiatan ini memiliki hambatan tersendiri yaitu minimnya minat siswa karena harga dari makanan yang berbahan dasar tersebut relatif mahal. Dinas kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan sedang mengusahakan bagaimana makanan berbahan dasar ikan tersebut lebih terjangkau. Dalam melakukan sosialisasi ini Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan Dan Perikanan fokus pada kandungan ikan.

B. Hambatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Mengonsumsi Ikan Segar

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan disebabkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ikan ini memang masih rendah, karena ada yang memang masyarakat penghasil ikan tapi ikan ini tidak diberikan kepada anak dan keluarganya, tetapi justru semua dijual. Harga ikan yang kadang masih mahal, sehingga masyarakat lebih memilih lauk pauk yang lebih terjangkau seperti tahu, telur dan tempe.

2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Makan Ikan dan Kandungan Gizi yang Terdapat Dalam Ikan Segar

Manfaat daging ikan untuk kesehatan memang sangat banyak sekali. Perkembangan informasi memang membuat banyak perubahan dalam perilaku kesehatan masyarakat. Dulu ada anggapan. "Kalau kebanyakan makan ikan, bisa cacingan," sehingga banyak anak kecil enggan makan ikan. Sekarang, banyak makan ikan malah dianjurkan, karena dipercaya dapat mencegah gangguan jantung.

3. Munculnya Persepsi Masyarakat Jika Makan Ikan, Maka Akan Timbul Alergi Gatal-Gatal

Pada orang dewasa pangan yang menimbulkan reaksi tidak nyaman paling banyak adalah makanan laut, ikan, udang, lobster, kepiting, cumi, juga kacang-kacangan serta telur. Pada anak-anak biasanya disebabkan oleh berbagai produk telur, susu dan kacang.

Alergi pada orang dewasa umumnya bertahan, sedangkan pada

anak-anak kerap hilang seiring bertambahnya usia. Frekuensi menyantap satu jenis makanan berpengaruh terhadap alergi. Di Jepang, misalnya, alergi nasi lebih banyak ditemukan sementara di negara-negara Skandinavia, alergi ikan bandeng lebih sering terjadi.

4. Banyak Orang Beranggapan Bahwa Ikan Menimbulkan Bau Amis

Orang cenderung menghubungkan bau amis ikan dengan pasar tradisional karena menurut mereka dimana ada ikan maka mereka dapat mencium bau amis, akan tetapi ikan tidak harus bau amis, apabila ikan tersebut benar-benar segar.

Ketika baru beberapa jam di angkat dari air, ikan, kerang dan udang tidak akan mengeluarkan bau, mungkin masih ada aroma laut yang segar. Ketika bahan makanan asal laut ini mulai mulai mengurai, barulah aroma amis merebak ke mana-mana. Ikan mengurai atau membusuk jauh lebih cepat daripada daging-daging jenis lain. Daging ikan, otot ikan terbuat dari jenis protein yang berbeda dibandingkan dengan daging sapi dan ayam. Daging ini mengurai lebih cepat, tidak hanya karena dimasak, tetapi juga karena aksi enzim-enzim dan bakteri.

5. Banyak Masyarakat Beranggapan Bahwa Memakan Ikan Dapat Menyebabkan Keracunan

Banyak kasus keracunan terjadi karena mengonsumsi ikan tongkol. Keracunan dapat timbul setelah beberapa menit sampai beberapa jam setelah makan ikan tongkol. Gejalanya antara lain adalah

rasa gatal atau terbakar di sekitar mulut, bibir bengkak, wajah kemerahan, berkeriat, mual, muntah, sakit kepala, jantung berdebar, pusing, atau bentol-bentol merah di badan. Gejala ini biasanya membaik sendiri dalam beberapa jam, atau bahkan beberapa hari. Pada kasus yang berat kadang-kadang diperlukan pemberian obat antihistamin atau obat dan tindakan medis lainnya.

Ikan tongkol yang tergolong famili scombroidae, jika dibiarkan pada suhu kamar, maka segera akan terjadi proses penurunan mutu, menjadi tidak segar lagi dan jika ikan tongkol ini dikonsumsi akan menimbulkan keracunan. Keracunan ini disebabkan oleh kontaminasi bakteri patogen seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, *Enterobacteriaceae* dan lain-lain. Salah satu jenis keracunan yang sering terjadi pada ikan tongkol adalah keracunan histamin (*scombroid fish poisoning*) karena ikan jenis ini mengandung asam amino histidin yang dikontaminasi oleh bakteri dengan mengeluarkan enzim histidin dekarboksilase sehingga menghasilkan histamin. Bakteri ini banyak terdapat pada anggota tubuh manusia yang tidak higienis, kotoran/tinja, isi perut ikan serta peralatan yang tidak bersih.

Kasus-kasus keracunan akibat mengkonsumsi ikan masih sering terjadi. Untuk itu upaya penanganan ikan tongkol selama penyimpanan dengan penerapan teknologi tepat guna berupa penyiangan isi perut dan insang serta penyimpanan pada suhu rendah perlu dilakukan.

C. Cara Penyelesaian dari berbagai hambatan di atas :

1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kandungan gizi ikan segar sehingga masyarakat akan lebih memprioritaskan kandungan gizi dalam mengonsumsi makanan.
2. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai sasaran baik kepada ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak sekolah akan pentingnya makan ikan segar.
3. Penyuluhan dan sosialisasi bekerjasama dengan dokter untuk menghilangkan persepsi masyarakat tentang rasa gatal yang ditimbulkan setelah makan ikan, karena dengan melalui keterangan dokter ke masyarakat lebih mudah diterima oleh masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan pada Bab ini merupakan hasil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di Bab I. Pembahasan dimulai secara berurutan dari pertanyaan pertama lalu dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Berikut pembahasannya:

1. Masalah kesehatan di Kabupaten Jepara terutama kurangnya gizi pada masyarakat harusnya dapat diatasi dengan memanfaatkan nutrisi dan kandungan gizi yang terdapat dalam ikan segar yang ada di Kabupaten Jepara. Ikan segar mempunyai kandungan gizi yang sangat banyak, maka ikan diperhitungkan sebagai sumber zat gizi yang penting. Pola kebiasaan makan ikan pada masyarakat Eskimo dan Jepang memberi petunjuk kuat atas rendahnya kejadian penyakit jantung dan penyakit yang dapat menyebabkan kematian lainnya.

Kabupaten Jepara seharusnya tidak mengalami masalah seperti gizi, karena segala macam kebutuhan tentang kesehatan dan pangan sudah tersedia disana, hanya perlu kontribusi dari pemerintah secara maksimal dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus aktif mengingat “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”⁸

Seharusnya kerjasama antar Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, karena dengan adanya kerja sama antar dua lembaga tersebut masalah kurang gizi akan dapat ditangani dengan tepat. Ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan di Jepara harusnya diarahkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Jepara terlebih dahulu, tidak selalu diarahkan ke perdagangan. Dinas kesehatan Jepara juga harus sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya kurang gizi dan masalah kesehatan lainnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asli Mahasatya, 2001)
- Hilman, Hasikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau*

Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

James, A. Black, Dean, Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama, 1999)

Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976)

Muhamad, Nurhadi. *Kesehatan Masyarakat Veteriner*, (Yogyakarta:Gosyen Publishing, 2010)

Morris, L. Conen. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, terjemahan oleh Ibrahim R, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1995)

Ronny, Hanitijo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Soekidjo, Notoatmojo. *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004.

B. Peraturan Perundang – undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁸ Pasal 14 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*



Undang – Undang 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 75 Tahun
2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.

Peraturan Daerah Jepara Nomor 14
Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Jepara.

Perda Jepara Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jepara.